

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Hoaks merupakan hal yang sangat berbahaya bagi kestabilan kondisi masyarakat di Indonesia, terutama hoaks yang mengandung dengan unsur politik yang dapat disalahgunakan oleh suatu pihak untuk merugikan pihak lain. Perlunya penanggulangan hoaks tentu harus dilaksanakan secara masif, seperti yang disampaikan oleh salah satu pakar/ahli. Urgensi penanggulangan hoaks yang dikaitkan dengan kegiatan pemilihan umum yang akan datang akan pasti sangat menjadi krusial di dalam menjaga kondisi politik yang sehat. Maka dari itu, para lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia harus siap dengan ikut serta untuk melakukan penanggulangan hoaks yang akan tersebar di masyarakat, terutama hoaks yang berkaitan dengan tema politik, dengan cara masing-masing institusi membentuk sebuah peraturan setingkat kelembagaan mengenai penanggulangan hoaks yang akan dilakukan, seperti halnya dengan institusi BSSN yang dimana mereka membentuk Peraturan BSSN No 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber yang didasari oleh rencana strategis yang disusun yang terlampir pada Peraturan BSSN No 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BSSN Tahun 2020-2024, sehingga peraturan yang disusun dan dilaksanakan oleh BSSN tersebut memiliki dasar hukum dari peraturan yang lain. Meskipun hanya setingkat kelembagaan dan menurut salah satu pakar/ahli tidak mempunyai efek berskala nasional karena peraturan atau kebijakan tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup, namun hal tersebut tentu akan tetap mereduksi angka penyebaran hoaks yang terjadi di masyarakat. Lembaga BSSN meskipun melakukan penanggulangan hoaks, namun mereka menyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan ranah mereka melainkan ranah mereka lebih kepada menjaga ruang siber agar aman dari ancaman-ancaman yang ada. Meskipun demikian, harapan BSSN mengenai posisi mereka di dalam penanggulangan hoaks berharap akan lebih aktif turut ikut dalam menanggulangi hal tersebut di masa yang mendatang.

Terkait dengan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh BSSN atau pihak manapun, tentu akan dapat membantu sebuah kebijakan untuk disempurnakan sehingga mereka tercapai

terkait dengan realisasi kebijakan yang diharapkan dimana target kebijakan menerima dampak yang signifikan sehingga kebijakan tersebut secara efektif dapat menekan penyebaran hoaks yang terjadi di masyarakat, terutama di masyarakat yang menggunakan ranah siber sebagai ranah komunikasi dan menekan hoaks yang bertema politik sehingga penanggulangan hoaks politik di ranah siber menjadi tercapai. Kebijakan itu juga dapat di-evaluasi mengenai dampak terhadap masyarakat itu sendiri dengan indikator-indikator yang ada seperti yang disampaikan oleh salah satu pakar/ahli, sehingga dapat membantu dalam menyempurnakan sebuah kebijakan. Meskipun langkah dan kiat kebijakan bentuk nya berbeda-beda, namun hal tersebut bukanlah menjadi suatu masalah di dalam melakukan penyempurnaan sebuah kebijakan karena tujuan dari evaluasi kebijakan lebih berfokus bagaimana sebuah kebijakan berjalan secara baik sehingga mencapai harapan yang diharapkan.

Kondisi saat ini terkait dengan penegakan hukum menurut BSSN lebih kepada pemberian persepsi yang positif dengan mendukung adanya penegakan hukum terkait dengan hoaks, dan para pakar/ahli, masih minim, belum terlihat, dan ada unsur pilih-pilih atau tebang pilih di dalam penegakan hukum tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan peraturan yang dapat menjerat pelaku penyebaran hoaks serta melakukan reformasi di dalam sistem hukum sehingga penegakan tersebut tidak lagi bersifat pilih-pilih yang menyebabkan sistem hukum tersebut menjadi korup. Namun, hal yang unik ditemukan adalah menurut pakar/ahli bahwa kebijakan yang disusun dalam penanggulangan hoaks (terutama kebijakan BSSN) tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan politik, meskipun dengan keberadaan *stakeholder* itu merupakan sebuah bentuk aspirasi politik dari para pemangku kepentingan untuk mencegah hoaks yang berumpama untuk menciptakan kondisi politik yang sehat (dimana aspirasi politik yang sehat merupakan salah satu bentuk tujuan politik seseorang) sehingga meskipun anggota BSSN dan pakar/ahli mengatakan hal tersebut tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan politik, namun dengan adanya pengaruh dari pemangku kepentingan, hal tersebut tidak bisa terlepas dari tujuan yang mengandung tema politik. Para pakar/ahli juga memberikan ajakan untuk tidak membawa unsur politik kepada kebijakan sehingga lebih bersifat ilmiah, salah satunya dengan cara untuk bersikap netral. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pernyataan politik bahwa para aktor yang melakukan atau terlibat pada sebuah kebijakan untuk bersifat netral adalah salah satu bentuk atau aksi politik yang dilakukan oleh seseorang untuk menempatkan posisi-nya, sehingga menarik pada saat pembahasan di riset ini terkait dengan pernyataan pakar/ahli yang memberikan gambaran untuk

tidak membawa hal tersebut ke ranah politik namun pernyataan mereka juga mengandung unsur politik, meskipun penjelasan mereka berbeda-beda.

Berdasarkan hasil terkait dengan respon masyarakat melalui survei, sebanyak 55,6% yang tidak mengetahui bahwa bahwa BSSN telah mengeluarkan kebijakan berupa: Peraturan BSSN Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber, sedangkan sejumlah 44,4% mengetahui kebijakan tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa mayoritas dari masyarakat itu masih belum mengetahui bahwa ada sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh BSSN di dalam penanggulangan hoaks, sehingga BSSN harus lebih melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan mereka secara masih. Serta hasil perhitungan dari faktor internal atau IFAS dan faktor eksternal atau EFAS sebesar 2,97 dan 3,28 secara berurutan, yang menunjukkan bahwa masyarakat menilai faktor internal berdasarkan hasil temuan yang membahas kebijakan penanggulangan hoaks yang dilaksanakan oleh BSSN dengan mayoritas menilai sangat penting dan sangat berpengaruh, meskipun ada beberapa respon masyarakat yang menilai bahwa hal tersebut tidak penting atau tidak berpengaruh. Serta juga dengan penilaian faktor eksternal yang diperoleh dari analisis SWOT yang menilai bahwa mayoritas menilai sangat penting dan sangat berpengaruh, meskipun ada beberapa respon masyarakat yang menilai bahwa hal tersebut tidak penting atau tidak berpengaruh, sehingga penilaian masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut cenderung dominan pada angka yang lebih mendekati sangat berpengaruh dan sangat penting bagi kedua faktor tersebut.

V.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penggunaan objek penelitian yang lebih rinci seperti melakukan wawancara terhadap narasumber yang lebih banyak dan berasal dari Badan Siber dan Sandi Negara, yang dimana penelitian ini tidak melakukan disebabkan oleh keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari institusi tersebut dan waktu yang terbatas sehingga penulis juga menggunakan metode observasi untuk memperkuat data dan melakukan wawancara terhadap pakar/ahli untuk mengetahui pendapat mereka sehingga penelitian ini lebih mengarah kepada unsur *expert review*. Dalam penggunaan *literature review* juga sebaiknya harus menggunakan lebih banyak referensi dan menggunakan referensi yang mirip dengan kebijakan yang dituju, seperti referensi yang mirip dengan penanggulangan hoaks oleh BSSN, namun hal tersebut untuk penelitian ini belum dapat dilampirkan karena keterbatasan data dan belum ada penelitian sebelumnya yang membahas secara spesifik

mengenai kebijakan penanggulangan hoaks oleh BSSN tersebut. Penulis juga menyarankan untuk menambahkan jumlah narasumber sehingga semakin banyak data yang diperoleh maka jawaban yang diperoleh akan semakin luas dan unik sehingga menambah keunikan pada penelitian. Penulis juga menambahkan untuk teknik Observasi juga sebaiknya dilakukan secara tatap muka bila observasi terhadap kebijakan yang dilakukan seperti literasi media dilakukan secara *offline* atau turut hadir secara *online* bila acara tersebut untuk masyarakat umum sehingga lebih mengetahui apa saja isi dari literasi media untuk mencegah hoaks yang tersebar di masyarakat. Dalam melakukan survei dengan kuesioner kepada masyarakat, sebaiknya juga harus lebih banyak terkait dengan sampel yang diperoleh karena semakin banyak sampel maka semakin baik terkait dengan aspek yang ingin dilihat seperti reaksi dari masyarakat terkait sebuah kebijakan.